



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN LKjIP TAHUN 2025

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN WAJO**

JL Veteran No. 29 Sengkang

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2024 merupakan wujud Akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan yang dipertegas melalui Perjanjian Kinerja 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo disusun sesuai Amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi serta meyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, diharapkan dimasa yang akan datang sasaran strategis dapat lebih optimal, sehingga dapat mendukung capaian visi misi sebagai Pemerintah yang Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien.

Sengkang, Pebruari 2026

Kepala Dinas

Drs. SAINAL HAYAT, M.Si
Pangkat, Pembina Utama Muda
19690424 199403 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C. ISU STRATEGIS	12
D. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
1. Tujuan dan Sasaran	15
2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	16
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	19
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	334
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	334
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2025	367
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja antara Tahun 2025, Tahun 2024 dan Tahun 2023	45
3. Perbandingan Realisasi Dan Target Renstra Perangkat Daerah	46
4. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)	478
5. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja Dan Solusi.....	489
6. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	4954
7. Analisis Evaluasi Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	589
B. REALISASI ANGGARAN	645
1. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	64
2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah	734
3. Rasio Belanja Terhadap Sasaran RPJMD	82

C. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HASIL EVALUASI INSPEKTORAT DAERAH 2022	86
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
LAMPIRAN	90

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
1.	Struktur Organisasi	5
2.	Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	8

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1.	Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo	15
Tabel.2.1.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	18
Tabel.2.1.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Wajo	20
Tabel.2.1.3 .	Target Indikator Kinerja Kunci	21
Tabel 2.2	Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Tabel.2.2.1.	Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2024	31
Tabel 3. 1	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 3.1a	Tabel Pencapaian IKK (Ton dan Persen)	36
Tabel 3.1.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Produksi Perumahan dan Kawasan Permukiman	38
Tabel 3.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja antara Tahun 2025, Tahun 2024 dan Tahun 2023	46
Tabel 3.3.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Renstra Perangkat Daerah	47
Tabel 3.4.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional	48
Tabel 3.5.	Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Solusi	49
Tabel 3.6.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
Tabel 3.7.	Analisis Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	60
Tabel 3.8	Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Juknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan laporan Kinerja paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Salah satu dari Pasal 3 Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 yakni asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berupa laporan kinerja instansi pemerintah laporan tersebut harus memberikan gambaran yang luas seobjektif mungkin mengenai tingkat pencapaian kinerja, sasaran, program, kegiatan dan indikator baik keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Sejalan dengan makna *Good Governance* dimaksud, kebijakan umum pemerintah diarahakan untuk mendorong mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya, serta berorientasi pada hasil (outcome). Untuk mencapai sasaran yang dimaksud dikembangkan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur yang diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan yang berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo sebagai Instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Wajo. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun pada tahun 2025 – 2026.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

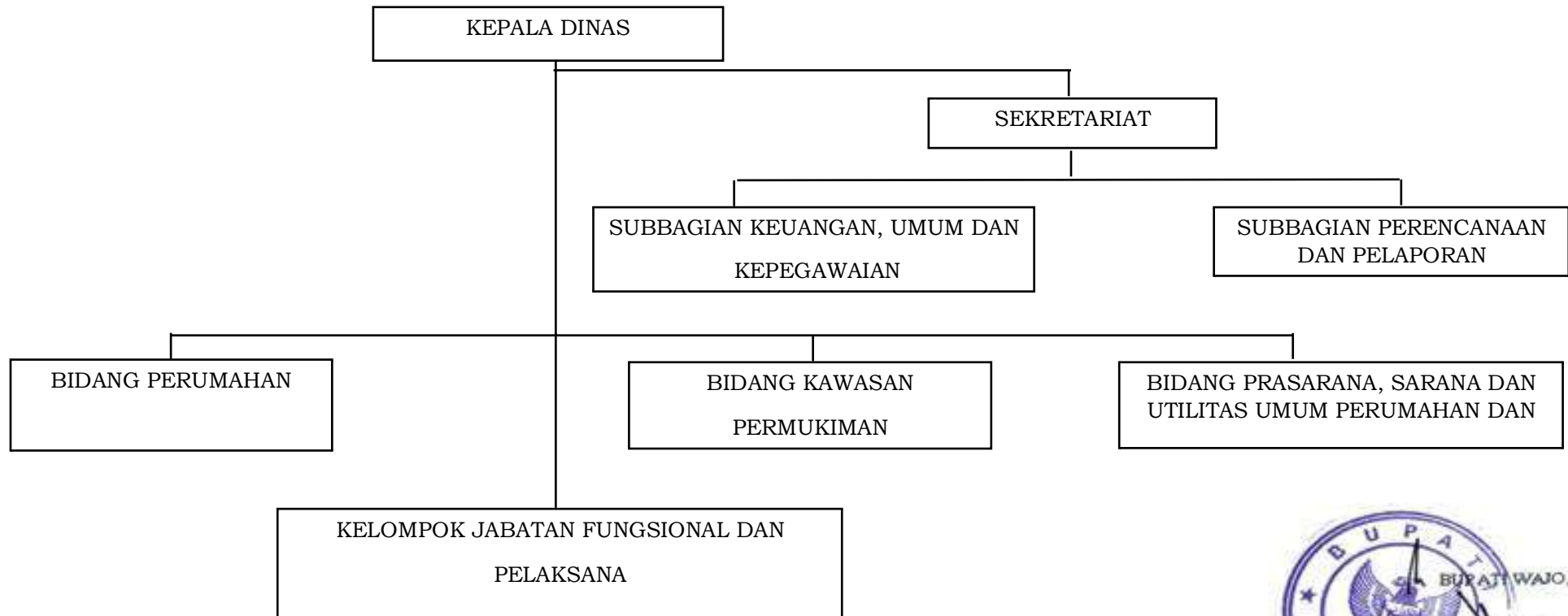
- a. Meningkatkan kualitas pemenuhan rumah layak huni dengan merehabilitasi rumah korban bencana dan menfalitasi rumah bagi relokasi program pemerintah daerah
- b. Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni dengan menyediakan / merehabilitasi rumah bagi warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
- c. Meningkatkan kapasitas Infrastruktur Permukiman untuk meujudkan kawasan permukiman bebas kumuh.
- d. Peningkatan kapasitas Infrastruktur dengan Pembangunan Jalan, Drainase dan Talud
- e. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Ketenagalistrikan melalui Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum serta Pengadaan KWH
- f. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman ;dan

- g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN WAJO



AN

Kondisi Kepegawaian

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo, saat ini didukung oleh :

a. Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Umur

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2025 (ASN) tercatat sebanyak 3 orang, 1 Orang PPP3K dan NON ASN tercatat 35 orang , dengan tingkat ASN dan PPP3K : 33 Orang Tenaga Kontrak: 39 Orang

pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Magister Sains (S2).



S2: 15 Orang



S1: 28 Orang



Diploma : -



SMA : 15 Orang



SMP: - Orang



SD: 1 Orang





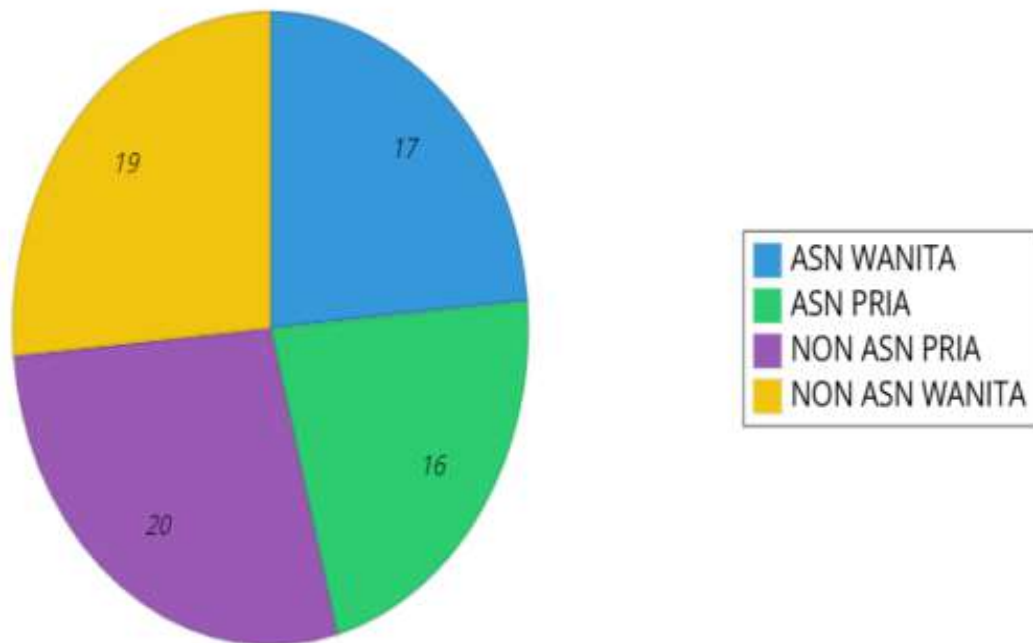
Mendampingi Tim Balai PKP untuk PHO keg.sanitasi kumuh di



Pendataan Rumah Tidak Layak Huni di Kec.Pitumpanua

SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.WAJO



Gambar 2. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sejalan dengan jumlah anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari segi jumlah sarana dan prasarana belum memadai. Sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan kinerja. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo masih membutuhkan tambahan ruang arsip, ruang perpustakaan, gudang dan data center.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

Adapun sumber daya sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini:

DAFTAR ASET TETAP PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN WAJO

NO	KIB	URAIAN	JUMLAH
1	A	TANAH	32.310.777.241
2	B	PERALATAN DAN MESING	3.994.946.785
3	C	GEDUNG DAN BANGUNAN	3.434.895.620
4	D	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	69.157.364.456
5	E	ASEP TETAP LAINNYA	0
6	F1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan Gedung dan Bangunan	39.930.000
7	F2	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	226.868.862
8		ASET TIDAK BERWUJUD	0
		JUMLAH	109.164.782.964

NO	PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	JML	HARGA
1	Filing Kabinet	1	750.000
2	Brankas	1	750.000
3	Mesin Ketik Elektrik	1	2.500.000
4	Rak Kayu	1	600.000
5	Meja Rapat	1	1.500.000
6	Handy Alince 195	1	2.220.000
7	Lemari Arsip Kayu	2	3.500.000
8	Meja Kerja 1 Biro	3	1.800.000
9	Meja Kerja 1/2 Biro	2	2.200.000
10	Meja 1/2 Biro	4	2.600.000
11	Lemari Arsip	10	20.000.000
12	Komputer (PC)	1	8.000.000
13	Meja kerja 1/2 biro	3	5.688.000
14	Kursi kerja (kursi lipat)	15	5.900.400
15	Camera Digital	1	2.995.000
16	Lemari Arsip Kayu	2	6.150.000
17	Filling Kabinet	2	2.050.000
18	Meja Kerja 1/2 Biro	7	17.322.450
19	Kursi Kerja Eselon III	4	4.024.600
20	Kursi Kerja Eselon IV	8	4.068.800

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	JML	HARGA
21	AC Split	1	4.068.100
22	Komputer PC	1	5.098.900
23	Lemari Arsip	2	5.000.000
24	Filling Kabinet	2	6.000.000
25	Meja 1/2 Biro	5	7.441.500
26	Meja Biro	5	14.973.750
27	Kursi Eselon III	5	8.470.000
28	Kursi Eselon IV	5	4.961.000
29	Kursi Kerja Staf	20	9.922.000
30	Kursi Tamu	1	10.431.750
31	Peralatan dan Mesin - Lap Top	1	10.000.000
32	Peralatan dan Mesin - AC Split	1	12.200.000
33	Peralatan dan Mesin - Camera Electronic	1	2.500.000
34	Peralatan dan Mesin - Camera Electronic	1	7.500.000
35	Peralatan dan Mesin - Camera Electronic	1	2.000.000
36	Peralatan dan Mesin - Lap Top	1	10.400.000
37	Peralatan dan Mesin - P.C Unit/ Komputer PC	1	8.292.500
38	AC Split	2	9.500.000
39	Kipas Angin	2	2.000.000
40	Lap Top	1	10.400.000
41	P.C Unit/ Komputer PC	2	18.698.000
42	Meja Komputer	2	4.150.000
43	Meja Kerja	3	6.150.000
44	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	1	6.150.000
45	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3	7.650.000
46	Papan Nama Instansi	2	18.200.000
47	Mesin Absensi	1	5.000.000
48	AC Unit	1	4.100.000
49	Kipas Angin	1	1.600.000
50	Rak Besi/Metal	1	11.000.000
51	Meja Komputer	1	3.250.000
52	Kursi Kerja	5	4.050.000
53	Alat Ukur Tanah	1	100.500.000
54	Lemari Arsip Dinamis	2	2.000.000
55	Ac	3	11.550.000
56	AC Unit	1	4.500.000
57	AC Split	1	4.625.500
58	P.C Unit	1	8.342.450
59	Lap Top	1	6.799.822
60	Lap Top	1	6.799.822
61	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	3.583.398
62	LCD Projector/Infocus	1	6.720.308
63	A.C. Split	2	8.845.640
64	Lap Top	1	6.940.875

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	JML	HARGA
65	Lap Top	2	17.661.600
66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	4.125.500
67	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	7.247.500
68	Meja Kerja Kayu	10	24.530.000
69	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	6.690.000
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.999.350
71	Kursi Putar	10	8.362.500
72	Lap Top	2	28.900.000
73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.350.000
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.400.000
75	Komputer Unit Lainnya	1	19.000.000
76	Lap Top	1	12.000.000
77	Lap Top	2	29.000.000
78	Lap Top	1	9.500.000
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2.300.000
80	Komputer Unit Lainnya	1	21.400.000
81	Lap Top	3	60.162.000
82	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	9.984.000
83	A.C. Split	1	6.242.000
84	A.C. Split	1	9.742.000
	JUMLAH	213	791.581.015

C. ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu-isu strategis, maka faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Wajo ditinjau dari permasalahan pembangunan Daerah yaitu :

1. Keterbatasan Alokasi Anggaran SPM;
2. Besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dengan Kualitas rumah tidak memenuhi standar kelayakan huni dan;
3. Minimnya luasan penanganan kawasan kumuh yang dilakukan secara skala kawasan;
4. Masih rendahnya kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Minimnya penanganan penerangan jalan umum utamanya wilayah pedesaan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah diatas maka dapat ditarik beberapa isu strategis yaitu :

1. Terdapat beberapa kawasan permukiman yang rawan bencana sehingga perlu adanya rehabilitasi / relokasi rumah paska bencana
2. Masih banyaknya kelompok masyarakat yang tergolong Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pada umumnya bertempat tinggal di Rumah Tidak Layak Huni.
3. Masih terdapatnya permukiman kumuh di perkotaan
4. Kondisi prasarana dan sarana dan utilitas kawasan permukiman banyak mengalami degradasi
5. Masih kurang memadainya PJU di pedesaan
6. Perlunya diusahakan PJU tenaga surya sebagai alternatif selain sumber listrik dari PLN

D. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Strategis merupakan suatu pola tujuan kebijakan program kegiatan keputusan maupun pengalokasian sumberdaya yang memerlukan pemahaman tentang organisasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung RPD 2025-2026 terkait dalam Misi 1 yaitu Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi yang Inklusif. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Wajo sehingga hasil dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berfokus kepada Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta Perluasan akses dan kesempatan dan misi ke 2 yaitu Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat. Misi ini bertujuan menyediakan pelayanan publik yang berkualitas yang berfokus kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi dalam pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya birokrasi untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Sasaran pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai visi dan misi yaitu:

1. Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak
 - Mengurangi backlog (kekurangan rumah).
 - Penyediaan rumah layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 - Program bedah rumah atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).
2. Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan
 - Penataan kawasan kumuh menjadi lingkungan sehat dan tertata.
 - Pengembangan permukiman berbasis lingkungan (green settlement).
 - Penyediaan ruang terbuka hijau dan fasilitas umum.
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)
 - Akses air bersih, sanitasi, dan drainase.
 - Jalan lingkungan yang memadai.
 - Pengelolaan persampahan yang efektif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

4. Pengurangan Kesenjangan Wilayah
 - Pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
 - Prioritas pada kawasan tertinggal atau rawan.
5. Ketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
 - Pembangunan rumah tahan bencana.
 - Penataan kawasan rawan banjir atau longsor.

Permasalahan Pelayanan Dinas PERKIM berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan D.PERKIM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	Minimnya anggaran yang dialokasikan.		
2	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Meningkatnya permukiman kumuh dipertanian	Terdapat kelompok masyarakat yang menetap dikawasan kumuh dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik.	Peraturan Pemerintah No.88 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.tahun 2016 mendukung sepenuhnya penanganan permukiman Kumuh perkotaan
3	Meningkatnya pembiayaan dan penyediaan perumahan	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang perumahan permukiman	Terdapat kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan umumnya bertempat tinggal di rumah tidak layak huni.	Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.6 tahun 2013 mendukung sepenuhnya Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB) rumah tidak layak huni.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Wajo. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2025 - 2026 menjadi dasar Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Wajo, seperti pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rencana Startegis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo

IKU RPJMD	TARGET RPJMD TAHUN 2025	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai/Predikat SAKIP Kabupaten	(70,11,-75,00) / BB	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai (Predikat) SAKIP	B
Cakupan Daya Saing Infrastruktur	76,83	Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Tertata	0,05
		Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100 %
		Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Persentase Permukiman yang Tertata	59,95 %

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam upayamencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 – 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Kabupaten Wajo sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025 – 2026.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain:

1. Pelaksanaan pemenuhan Penunjangurusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Rumah Layak Huni bagimasyarakat korban bencana dan atau Relokasi ProgramPemerintah
3. Meningkatkan kualitas pemenuhan rumah layak huni bagimasyarakat mis kin dan masyarakat berpenghasilan rendah
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman kumuh melalui penciptaan lingkungan sehat perumahan
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman
6. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Ketenagalistrikan

Strategi diatas diimplementasikan dengan dukungan arah kebijakan yang akan dikembangkan antara lain:

1. Meningkatkan pemenuhan urusan dengan penyediaan administrasi
2. Yang akuntabel.
3. Meningkatkan pengelolaan laporan keuangan yang berbasis akrual
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
5. Meningkatkan kualitas pemenuhan rumah layak huni dengan merehabilitasi rumah korban bencana dan menfalitasi rumah bagi relokasi Program Pemerintah Daerah
6. Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni dengan menyediakan /merhabilitasi rumah layak huni bagi warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah

7. Meningkatkan kapasitas Infrastruktur Permukiman untuk mewujudkan kawasan permukiman bebas kumuh. pembangunanJ alan, Drainase dan Talud
8. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Ketenagalistrikan melalui Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum serta Pengadaan KWH Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mendukung peningkatan kuallitas dan kuantitas Dokumen perencanaan dengan penganggaran Perangkat daerah melalui pemenuhan layanan serta sarana dan Prasarana pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sedangkan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, seperti pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel.2.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel.2.1.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi 2025-2029**

Tujuan RPD: Mengoptimalkan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Akuntabel				
Sasaran RPD: Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			2025	2026
Tujuan 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Strategi 1 : Pelaksanaan pemenuhan penunjang urusan yang berbasis akual dan terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal pelaporan dan evaluasi dengan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi	Meningkatkan kapasitas SDM dalam hal pelaporan dan evaluasi dengan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi
Tujuan RPD : Meningkatkan Konektifitas dan Infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan				
Sasaran RPD : Meningkatkan Konektivitas Wilayah yang Berwawasan Lingkungan				
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Strategi 1 : Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana alam atau relokasi program kabupaten/kota	Menyediakan dan merehabilitasi rumah bagi korban bencana alam atau relokasi program kabupaten/kota	Menyediakan dan merehabilitasi rumah bagi korban bencana alam atau relokasi program kabupaten/kota
	Meningkatnya luas permukiman yang tertata	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	Menyediakan dan merehabilitasi rumah bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah	Menyediakan dan merehabilitasi rumah bagi masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
		Strategi2: Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman kumuh melalui penciptaan lingkungan sehat perumahan	Meningkatkan kapasitas infrastruktur permukiman untuk mewujudkan kawasan bebas kumuh	Meningkatkan kapasitas infrastruktur permukiman untuk mewujudkan kawasan bebas kumuh
		Strategi3: Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dengan pembangunan jalan, drainase dan talud	Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dengan pembangunan jalan, drainase dan talud
		Strategi4: Meningkatkan prasarana dan sarana ketenagalistrikan	Pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum serta pengadaan kWh bagi masyarakat yang belum memiliki kWh	Pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum serta pengadaan kWh bagi masyarakat yang belum memiliki kWh

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

➤ Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja utama (IKU) adalah ukuran atau indikator Kinerja suatu instansi utamanya mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Tujuan menetapkan IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Wajo adalah untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih setiap tahun.

Anggaran dan untuk mendapatkan informasi penting terkait kinerja ASN yang nantinya bisa dijadikan pedoman/acuan dalam Menyusun manajemen kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk sebelum Perubahan renstra dan setelah perubahan renstra mengalami perubahan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Wajo

Indikator Kinerja Utama (Pokok)							Indikator Kinerja Utama Perubahan Renstra					Kondisi Akhir Periode Perubahan Renstra	
No	IKU Renstra (Pokok)	Satuan	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	No	IKU Perubahan Renstra	Asumsi Capaian 2021	Target 2022	Target 2023		Target 2024
1	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Hektare	0,420	0,420	0,419	0,419	1	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	59,95	59,95	59,95	59,96	59,96
2	Persentase Permukiman yang Tertata	Hektare	59,45	59,94	59,94	59,94							
3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektare	3,50	3,79	5,810	5,810							
4	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung Dengan PSU	Persen	0,02	0,02	0,04	0,04							
5	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persen	24,10	24,12	24,10	24,12							
6	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Persen			100	100	2	Rata-rata Capaian SPM Bidang Perumahan	90	100	100	100	100
7	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga yang terkena Relokasi Program Pemerintah	Persen			100	100							

➤ **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Selain Indikator Kinerja Utama, dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan permendagri 18 tahun 2020, indikator kinerja kunci adalah indikator yang menggambarkan suatu keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah.

Adapun indikator kinerja kunci tahun 2025 untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :

Tabel.2.1.3 . Target Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180	
2	Rasio rumah layak huni	Hektare	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	
3	Rasio permukiman layak huni	Hektare	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	
5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	37,98	39.62	41.17	42.64	44.05	45.38	46.66	
6	Persentase pemukiman yang tertata	Persen	60.29	60.29	60.30	60.31	60.32	60.33	60.34	
7	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	0,470	0.470	0.470	0.470	0.470	0.469	0.469	
8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	4,63	4.99	5.36	5.72	6.09	6.46	6.82	
9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	2,28	2.28	2.27	2.27	2.27	2.26	2.26	
10	RT dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	37,98	39.62	41.17	42.64	44.05	45.38	46.66	
11	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	21,15	21.98	22.53	23.08	23.35	23.63	24.18	

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

Tabel 2.2 Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		JUMLAH PAGU TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai (Predikat) SAKIP	B	B	4.818.829.456	4.503.359.382	Drs. SAINAL HAYAT., M.Si	Kepala Dinas
l.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (PERKIM)	100 %	100 %	4.818.829.456	4.503.359.382	Drs. SAINAL HAYAT., M.Si	Kepala Dinas
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya penyelesaian Renstra, Renja dan Laporan Kinerja	100 %	100 %	29.000.000	29.873.500	SARWAN, S.T., M.Si	Sekretaris
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000	16.750.000	H. AMBO ECCE, M,Si	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.462.500	H. AMBO ECCE, M,Si	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.299.000	H. AMBO ECCE, M,Si	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.213.000	H. AMBO ECCE, M,Si	Kasubag Perencanaan & Pelaporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		JUMLAH PAGU TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	3.000.000	3.149.000	H. AMBO ECCE, M,Si	Kasubag Perencanaan &Pelaporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya penyelesaian keuangan	100 %	100 %	4.139.829.456	3.987.229.482	Sarwan, S.T., M.Si	Sekretaris
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/bulan	33 orang/bulan	4.127.829.456	3.972.699.482	ASDAR, S.E	Kasubag Keu- angan,Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Administrasi Pelaksana- anTugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keu- angan,Umum & Kepegawaian
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0	2.530.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keu- angan,Umum & Kepegawaian
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Kepegawaian	100 %	100 %	6.000.000	6.000.000	Sarwan, S.T., M.Si	Sekretaris
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tu- gas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	6.000.000	6.000.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keu- angan,Umum & Kepegawaian
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pemenuhan penunjang administrasi umum	100 %	100 %	284.435.800	136.884.200	Sarwan, S.T., M.Si	Sekretaris
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.000.000	1.000.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keu- angan,Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Peralatan dan Per- engkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka- pan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.992.800	1.231.200	ASDAR, S.E	Kasubag Keu- angan,Umum & Kepegawaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		JUMLAH PAGU TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	0	1.327.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan, Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	28 Dokumen	28 Dokumen	1.200.000	1.200.00010	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan, Umum & Kepegawaian
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	275.243.000	132.126.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan, Umum & Kepegawaian
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100 %	100 %	0	90.086.000	Sarwan, S.T., M.Si	Sekretaris
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 Unit	6 Unit	0	90.086.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan, Umum & Kepegawaian
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan pemenuhan kebutuhan pegawai	100 %	100 %	298.682.000	172.404.000	Sarwan, S.T., M.Si	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan, Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000	700.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan, Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	2.562.800	2.562.800	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan, Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	272.719.200	154.141.200	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan, Umum & Kepegawaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		JUMLAH PAGU TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	56.882.200	76.882.200	Sarwan, S.T., M.Si	Sekretaris
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkanPajaknya	1 Unit	1 Unit	40.000.000	40.000.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan,Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ata Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	15.000.000	15.000.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan,Umum & Kepegawaian
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.882.200	21.882.200	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan,Umum & Kepegawaian
7	PenataanOrganisasi	Persentase peningkatan penyusunan dokumen tepat waktu	100 %	100 %	4.000.0000	4.000.0000	Sarwan, S.T., M.Si	Sekretaris
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	ASDAR, S.E	Kasubag Keuangan,Umum & Kepegawaian
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	H. AMBO ECCE, M,Si	Kasubag Perencanaan & Pelaporan
B.	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100 %	100 %	440.000.000	382.330.000	Drs. SAINAL HAYAT., M.Si	Kepala Dinas
II.	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	100 %	100 %	440.000.000	382.330.000	Drs. SAINAL HAYAT., M.Si	Kepala Dinas
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah warga yang difasilitasi akibat relokasi dari program pemerintah	100 %	100 %	68.000.000	29.240.000	Hj. Ita Herlina, S.T., M.Si	Kepala Bidang Perumahan & PSU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		JUMLAH PAGU TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1Dokumen	1Dokumen	46.000.000	14.190.000	Hj. Andi Mama, S.Sos	Sub Koordinator Penyediaan & Pembiayaan Perumahan
	Pendataan dan Verifikas Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terverifikasi	1Dokumen	1Dokumen	12.000.000	6.060.000	Hj. Andi Mama, S.Sos	Sub Koordinator Penyediaan & Pembiayaan Perumahan
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1Dokumen	1Dokumen	10.000.000	8.990.000	Hj. Andi Mama, S.Sos	Sub Koordinator Penyediaan & Pembiayaan Perumahan
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tertangani	100 %	100 %	371.000.000	352.090.000	Hj. Ita Herlina, S.T., M.Si	Kepala Bidang Perumahan & PSU
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang terehabilitasi	13 Unit Rumah	13 Unit Rumah	300.000.000	283.110.000	Hj. Andi Mama, S.Sos	Sub Koordinator Penyediaan & Pembiayaan Perumahan
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	71.000.000	68.980.000	Hj. Andi Mama, S.Sos	Sub Koordinator Penyediaan & Pembiayaan Perumahan
3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Site Plan yang disahkan	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	Hj. Ita Herlina, S.T., M.Si	Kepala Bidang Perumahan & PSU
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	Hj. Andi Mama, S.Sos	Sub Koordinator Penyediaan & Pembiayaan Perumahan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		JUMLAH PAGU TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C.	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Persentas Permukiman yang Tertata	17,78%	17,78%	452.400.000	377.565.000	Drs. SAINAL HAYAT., M.Si	Kepala Dinas
III.	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan	17,78%	17,78%	452.400.000	377.565.000	Drs. SAINAL HAYAT., M.Si	Kepala Dinas
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektar yang tertata / Luas permukiman yang tertata	3,84	3,84	15.000.000	6.950.000	Najma Ishak, S.T., M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	Survei dan Penetapan lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	6.950.000	Murti Yahya, S.T., M.Si	Sub Koordinator Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan
							Rani Laksmi Hubai, S.E.	Sub Koordinator Penataan Bangunan & Lingkungan
2	Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	0,05	0,05	437.400.000	370.615.000	Najma Ishak, S.T., M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	128.000.000	126.790.000	Murti Yahya, S.T., M.Si	Sub Koordinator Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	140.000.000	74.425.000	Najma Ishak, S.T., M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0,02	0,02	169.400.000	169.400.000	Murti Yahya, S.T., M.Si	Sub Koordinator Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025		JUMLAH PAGU TAHUN 2025		PENANGGUNG JAWAB	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IV	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio Permukiman Layak Huni	0,5%	0,5%	153.600.000	144.030.000	Drs. SAINAL HAYAT., M.Si	Kepala Dinas
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektar yang tertata / Luas permukiman yang tertata	0,5%	0,5%	153.600.000	144.030.000	Najma Ishak, S.T., M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	153.600.000	144.030.000	Najma Ishak, S.T., M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
V.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	0,40%	0,40%	4.087.722.600	6.087.340.350	Drs. SAINAL HAYAT., M.Si	Kepala Dinas
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas PSU Perumahan yang Tertangani	0,4	0,4	4.087.722.600	6.087.340.350	Hj. Ita Herlina, S.T., M.Si	Kepala Bidang Perumahan & PSU
							Najma Ishak, S.T., M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
							Supriadi Yamin, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Ketenagalistrikan
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	14 Lokasi	14 Lokasi	4.087.722.600	6.087.340.350	Herawati, S.T., M.Si	Sub Koordinator PSU Perumahan

Tabel.2.2.1.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2025

Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Lampiran I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata kelola perangkat Daerah dan Pelayanan Publik yang Efektif, efisien dan Akuntabel.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,70
2	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100%
3	Meningkatnya Juasari Perumahan yang tertata	Persentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Tertata	5,36%
		Persentase ketersediaan rumah layak huni	0,97%
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0,21%

Sengkang, 17 Oktober 2025

BUPATI WAJO



H. ANDROSMAN, S. Sos., M.M.

KEPALA PERANGKAT DAERAH



Des. SAINAL BAYAT, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/e

NIP : 19670101 199603 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN WAJO**

Lampiran II

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

B. Lampiran II

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Rata-rata capaian output kegiatan	96%
2	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Persentase Ketersediaan Rumah Korban Bencana bagi Korban Bencana	100%
3	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan yang tertata	Persentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Tertata	5,36%
4	Meningkatnya Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Perkotaan yang ditangani	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh yang tertangani	0,97%
5	Meningkatnya Kualitas PSU perumahan yang Sehat, Aman dan Terjangkau	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0,21%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.503.359.382	DAU
2.	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 582.350.000	DAU
3.	Program Kawasan Permukiman	Rp. 177.565.000	
4.	Program Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 144.050.000	
5.	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas umum (PSU)	Rp. 6.087.340.350	
		Rp. 11.494.624.732	

BUPATI WAJO


H. ANDI ROSMAN, S. Sos., M.M

Sengkang, 17 Oktober 2025
KEPALA PERANGKAT DAERAH,


Drs. SAINAL HAYAT, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. : 19670101 199603 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN WAJO

Lampiran III

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

C. Lampiran III

No.	Indikator Kinerja Lainnya	Target
(1)	(2)	(3)
1	Persentase pencapaian Program Strategis Nasional	100%
2	Persentase pencapaian 8 (delapan) Program Wajo Marafeka	100%
3	Persentase pemenuhan indikator MCSP KPK	100%
4	Persentase kemajuan kegiatan (fisik) perangkat daerah	100%
5	Persentase penyerapan anggaran	100%
6	Persentase Temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (termasuk temuan selama bertahun-tahun tidak selesai) sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang terlambat atau belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan masih relevan sampai tahun 2025	0%
7	Persentase Pelaporan LHKPN secara lengkap dan tepat waktu	100%
8	Persentase Pemenuhan Target PAD pada perangkat daerah atau PIBB pada Kecamatan Tahun 2025	-
9	Persentase Realisasi DAK dan DAUSG Tahun 2025	100%
10	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	0%
11	Persentase Laporan pengaduan/aspirasi masyarakat sesuai kewenangan perangkat daerah yang diselesaikan pada tingkat perangkat daerah	100%
12	Persentase Perintah atau arahan Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah baik lisan maupun tertulis yang terlambat atau tidak diselesaikan dengan baik oleh perangkat daerah sepanjang tahun 2025	0%
13	Predikat Penilaian Kebersihan Kantor Perangkat Daerah	Baik
14	Jumlah Penghargaan yang diterima oleh perangkat daerah dan/atau pementah daerah atas kontribusi perangkat daerah Tahun 2025	1 Penghargaan (Swasti Saba)
15	Jumlah bantuan Pusat (anggaran, barang dan/atau jasa) yang diterima oleh pemerintah daerah atas kontribusi perangkat daerah Tahun 2025	4 Jenis

BUKATI WAJO

H. ANDI ROSMAN, S. Sos., M.M

Sengkang, 17 Oktober 2025
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

Drs. SAINAL HAYAT, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/a
NIP : 19670101 199603 1 007

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo telah menetapkan target kinerja pencapaian sasaran strategis dengan upaya untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung target indikator kinerja sasaran strategis.

Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator 1.1. Nilai SAKIP

Sasaran 2 .Meningkatnya Pemenuhan SPM bidang Perumahan

Indikator 2.1 : Rata-rata Capaian SPM Bidang Perumahan

Sasaran 3 Meningkatnya Luasan Permukiman yang tertata

Indikator 2.2 : Persentase Permukiman yang tertata

Capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasi tahun 2025, sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut ;

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai (Predikat) SAKIP	BB	BB	100 %	
2	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100 %	100 %	100 %	
3	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Persentase Permukiman yang Tertata	59,95 %	60,27 %	100 %	

Untuk Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertuang dalam indikator kinerja kunci tahun 2025 untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.a Target Indikator Kinerja Kunci

No	Uraian IKK	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perubahan Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah
			2021	2022	2023	2024		
1	Rasio Rumah Layak Huni	Hektare	0,275	0,280	0,285	0,290	0,290	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Rasio Permukiman Layak Huni	Hektare	0,945	0,945	0,945	0,945	0,945	
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	94,70	94,72	94,75	94,78	94,78	
4	Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau	Persen	25,02	27,45	28,71	31,96	31,96	
5	Persentase Permukiman yang Tertata	Hektare	59,95	59,95	59,95	59,96	59,96	
6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Hektare	0,419	0,418	0,418	0,418	0,418	
7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Hektare	11,07	11,25	11,42	11,60	11,60	
8	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Persen	2,25	2,25	2,34	2,34	2,34	
9	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2025- 2026. Adapun angka realisasi dan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Produksi Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB		KET.
						NAMA	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai (Predikat) SAKIP	B	BB	100 %	Drs. SAINAL HAYAT, M.Si	KEPALA DINAS	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (PERKIM)	100 %	100 %	100 %	Drs. SAINAL HAYAT, M.Si	KEPALA DINAS	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya penyelesaian Renstra, Renja dan Laporan Kinerja	100 %	100 %	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si	SEKRETARIS	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB		KET.
						NAMA	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya penyelesaian keuangan	100 %	100 %	100%	Najma Ishak, S.T., M.Si	SEKRETARIS	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bulan	37 orang/bulan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB		KET.
						NAMA	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si	SEKRETARIS	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Pengaman Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengaman Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si	SEKRETARIS	
	Pendataan dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pemenuhan penunjang administrasi umum	100 %	100 %	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si	SEKRETARIS	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB		KET.
						NAMA	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si	SEKRETARIS	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 Unit	10 Unit	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan pemenuhan kebutuhan pegawai	100 %	100 %	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si	SEKRETARIS	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 Laporan	8 Laporan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si	SEKRETARIS	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB		KET.
						NAMA	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkanPajaknya	1 Unit	1 Unit	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ata Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
7	Penataan Organisasi	Persentase peningkatan penyusunan dokumen tepat waktu	100 %	100 %	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si	SEKRETARIS	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Najma Ishak, S.T., M.Si		
B.	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100 %	100 %	100 %	Drs. SAINAL HAYAT, M.Si	KEPALA DINAS	
II.	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	100 %	100 %	100 %	HERIDAL AZIZ, S. P.	Kepala Bidang Perumahan	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB		KET.
						NAMA	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah warga yang difasilitasi akibat relokasi dari program pemerintah	100 %	100 %	100 %	HERIDAL AZIZ, S. P.	Kepala Bidang Perumahan	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	HERIDAL AZIZ, S. P.		
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tertangani	100 %	100 %	100 %	HERIDAL AZIZ, S. P.	Kepala Bidang Perumahan	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	100 %	HERIDAL AZIZ, S. P.		
C.	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Persentas Permukiman yang Tertata	17,78%	17,78%	100 %	Drs. SAINAL HAYAT, M.Si	KEPALA DINAS	
III.	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan	17,78%	17,78%	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektar yang tertata / Luas permukiman yang tertata	3,84	3,84	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya masyarakat di Permukiman Kumuh	1 Kelompok masyarakat	1 Kelompok masyarakat	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB		KET.
						NAMA	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	Survei dan Penetapan lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si		
2	Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani	0,04	0,04	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	12 Unit Rumah	12 Unit Rumah	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	0,05 Ha	0,05 Ha	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si		
IV.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio Permukiman Layak Huni	0,496%	0,496%	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Hektar yang tertata / Luas permukiman yang tertata	0,496%	0,496%	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	7 Unit Rumah	7 Unit Rumah	100 %	NURPANCA, S. Sos, M.Si		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI	CAPAIAN (%)	PENANGGUNG JAWAB		KET.
						NAMA	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
V.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	0,40%	0,40%	100 %	Supriadi Yamin, S.IP, M.Si	Kepala Bidang PSU Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas PSU Perumahan yang Tertangani	0,4	0,4	100 %	Supriadi Yamin, S.IP, M.Si	Kepala Bidang PSU Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Supriadi Yamin, S.IP, M.Si		
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	14 Lokasi	14 Lokasi	100 %	Supriadi Yamin, S.IP, M.Si		
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	100 %	Supriadi Yamin, S.IP, M.Si		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	14 Lokasi	14 Lokasi	100 %	Supriadi Yamin, S.IP, M.Si		

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja antara Tahun 2025, Tahun 2024 dan Tahun 2023

Realisasi Kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Renstra. Realisasi kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo 2025-2026.

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran RPD Kabupaten Wajo.

Perbandingan realisasi kinerja selama 3 (tiga) tahun dapat dilihat dari table berikut ini :

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja antara Tahun 2025, Tahun 2024 dan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI			KETERANGAN
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Per- mukiman	Nilai (Predikat) SAKIP	B	BB	BB	Realisasi Data Tahun 2025 adalah data tahun sebelumnya
2	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100 %	100 %	100 %	
3	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Persentase Permukiman yang Tertata	59,95 %	59,96 %	59,96 %	

Berdasarkan Tabel tersebut diatas perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya produksi Perumahan dan Kawasan Permukiman terjadi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

perubahan indikator kinerja, dimana tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya mengalami kenaikan.

3. Perbandingan Realisasi Dan Target Renstra Perangkat Daerah

Tabel 3.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Renstra Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET PK TAHUN 2025	TARGET RENSTRA TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai (Predikat) SAKIP	BB	BB	BB	Data Tahun 2024
2	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100 %	100 %	100 %	
3	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Persentase Permukiman yang Tertata	59,95 %	59,96 %	59,96 %	

4. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (Jika Ada)

Tabel 3.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET PK TAHUN 2025	DATA STANDAR NASIONAL (Jika Ada)	REALISASI TAHUN 2025	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai (Predikat) SAKIP	BB	Tidak Ada	BB	
2	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100 %	100 %	100 %	
3	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Persentase Permukiman yang Tertata	59,95 %	Tidak Ada	60,27 %	

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disandingkan dengan standar pelayanan minimal/standar nasional lainnya ,karena Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan melaksanakan urusan wajib sehingga melaksanakan SPM atau pun standar Nasional lainnya.

5. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja Dan Solusi

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan Indikator Kinerja dalam rangka pencapaian tujuan / sasaran strategis dapat dilihat pada ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Solusi

No	Indikator	Capaian (%)	Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja	Upaya yang telah dilakukan	Solusi
1	2	3	4	5	6
1	Nilai (Predikat) SAKIP	100%	Persyaratan dan dokumen pendukung terpenuhi	Memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung penilaian SAKIP	Agar tetap dipertahankan
2	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100%	Terealisasi sesuai target rencana aksi karena fokus pada realisasi target penanganan SPM Bidang Perumahan Rakyat	Memfokuskan pada realisasi target SPM Bidang Perumahan Rakyat	Lebih memprioritaskan anggaran untuk penanganan SPM Bidang Perumahan Rakyat di tahun berikutnya
3	Persentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Tertata	100%	Nilai capaian melebihi target karena adanya tambahan kegiatan usulan dari pemangku kepentingan dan anggaran APBN untuk penanganan permukiman kumuh (PISEW)	Memaksimalkan penanganan kumuh dan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman	Agar tetap dipertahankan

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 masuk dalam kategori **berhasil**.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Penataan Organisasi, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 2) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

2. Program Pengembangan Perumahan

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - 2) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
 - 2) Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - 2) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
- d. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Sasaran : Meningkatnya Luasan Permukiman yang tertata. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Kawasan Permukiman
 - a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - 2) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
 - 3) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
 - b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - 3) Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 4) Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
 - 5) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 6) Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari subkegiatan:
 - 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, terdiri dari sub kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasa-

- rana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- 2) Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
 - 3) Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
 - 4) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

6. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, dan anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran 2025 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat / sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN %	JUMLAH ANGGARAN			ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA	KETERANGAN
			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	4.503.359.382	3.822.600.096	84,88%		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.503.359.382	3.822.600.096	84,88%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	29.873.500	29.757.500	99,61%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	16.750.000	16.728.000	99,87%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	3.462.500	3.445.000	99,49%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	3.299.000	3.273.500	99,23%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	3.213.000	3.187.000	99,19%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.149.000	3.124.000	99,21%		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.987.229.482	3.341.902.696	83,82%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	3.972.699.482	3.327.383.196	83,76%		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	12.000.000	11.995.000	99,96%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	2.530.000	2.524.500	99,78%		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	6.000.000	3.480.000	58,00%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	6.000.000	3.480.000	58,00%		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	136.884.200	132.288.085	96,64%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1.000.000	991.785	99,18%		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	1.231.200	1.223.300	99,36%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1.327.000	1.327.000	100%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	1.200.00010	1.100.00010	91,67%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	132.126.000	127.646.000	96,61%		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	90.086.000	86.130.000	95,61%		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	90.086.000	86.130.000	95,61%		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	172.404.000	154.969.900	89,72%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	15.000.000	14.969.900	99,80%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	700.000	325.000	46,43%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	2.562.800	2.500.000	97,55%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	154.141.200	136.891.200	88,81%		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	76.882.200	70.403.515	91,57%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	40.000.000	38.820.000	97,05%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	15.000.000	9.715.515	64,77%		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	21.882.200	21.868.000	99,94%		
7	Penataan Organisasi	100 %	4.000.0000	3.952.200	98,81%		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 %	2.000.000	1.992.500	99,63%		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100 %	2.000.000	1.959.700	97,99%		
B.	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	100 %	382.330.000	382.193.115	99,96%		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

II.	Program Pengembangan Perumahan	100 %	382.330.000	382.193.115	99,96%		
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	29.240.000	29.191.515	99,83%		
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100 %	14.190.000	14.189.007	99,99%		
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	6.060.000	6.058.500	99,49%		
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	8.990.000	8.944.008	99,94%		
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	352.090.000	352.001.600	99,97%		
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	100 %	283.110.000	283.065.800	99,98%		
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	100 %	68.980.000	68.935.800	99,94%		
3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	1.000.000	1.000.000	100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	1.000.000	1.000.000	100%		
C.	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	100 %	377.565.000	377.299.526	99,93%		
III.	Program Kawasan Permukiman	100 %	377.565.000	377.299.526	99,93%		
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %	6.950.000	6.944.000	99,91%		
	Survei dan Penetapan lokasi Permukiman Kumuh	100 %	6.950.000	6.944.000	99,91%		
2	Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %	370.615.000	370.355.526	99,93%		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	100 %	126.790.000	126.787.000	100%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100 %	74.425.000	74.279.526	99,80%		
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	169.400.000	169.289.000	99,93%		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

IV.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	144.030.000	144.019.500	99,99%		
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %	144.030.000	144.019.500	99,99%		
	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %	144.030.000	144.019.500	99,99%		
V.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	6.087.340.350	6.007.156.072	98,68%		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100 %	6.087.340.350	6.007.156.072	98,68%		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	100 %	6.087.340.350	6.007.156.072	98,68%		

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran , maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 84,88% Dengan jumlah personil ASN sebanyak 13 orang dan jumlah tenaga honorer sebanyak 12orang maka ini dianggap cukup memadai untuk memenuhi target capaian sasaran strategis.
2. Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99,96%, Dengan jumlah personil ASN sebanyak 7 orang dan jumlah tenaga honorer sebanyak 2 orang maka ini dianggap cukup memadai untuk memenuhi target capaian sasaran strategis.
3. Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata Capaian Kinerja dengan target 100 % dan capaian anggaran 99,93%, Dengan jumlah personil ASN sebanyak 7 orang dan jumlah tenaga honorer sebanyak 14 orang maka ini dianggap cukup memadai untuk memenuhi target capaian sasaran strategis.

7. Analisis Evaluasi Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berikut disajikan daftar analisis evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2025 :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

Tabel 3.7. Analisis Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	CAPAIAN (%)	TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN			TIDAK TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN			KETERANGAN			
				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai (Predikat) SAKIP	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD							
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
													Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
													Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
							Penyediaan Jasa Komunikas Sumber daya Air dan Listrik		
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
					Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan			
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

2	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan	100	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				
3	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Persentase Permukiman yang Tertata	100	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				

Tabel 3.8 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	REKOMENDASI INSPEKTORAT DAERAH	TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	PERENCANAAN KINERJA		Rekomendasi dan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) T.A.2024 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Inspektorat Kab.Wajo
1	Memerintahkan kepada Kasubag Perencanaan, agar dokumen perencanaan dipublikasikan melalui website sehingga dapat diakses bebas oleh publik	Dokumen perencanaan RENSTRA Dinas Perkim telah dipublikasikan melalui website disperkim.wajokab.go.id , namun dokumen RENJA belum dipublikasikan karena website Dinas Perkim sedang dalam kondisi maintenance	
	PENGUKURAN KINERJA		
2	Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	Dinas telah menyusun pedoman teknis berupa Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Dinas Perkim Kab.Wajo	
3	Memperbaiki SOP pengumpulan data kinerja dengan memberi nomor, tanggal pembuatan, tanggal revisi dan distempel	SOP telah diperbaiki dengan membubuhkan/menambahkan nomor, tanggal dan stempel DISPERKIM	
4	Meningkatkan (capaian) kinerja dengan mengaitkan pengukuran kinerja dengan pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>	Akan dilakukan peningkatan (capaian) kinerja di tahun selanjutnya dengan mengaitkan pengukuran kinerja dengan pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>	
	PELAPORAN KINERJA		
5	Melampirkan bukti hasil revidi laporan kinerja	Akan melakukan perbaikan di tahun selanjutnya dengan melampirkan bukti hasil revidi laporan kinerja	
6	Memerintahkan kepada Kasubag Perencanaan, agar dokumen laporan kinerja diupload tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen laporan kinerja telah diupload tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

	AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	
7	Menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal	Dinas telah menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal berupa Keputusan Kepala Dinas tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di Lingkungan Dinas Perkim Kab.Wajo
8	Menindak lanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, dan mengukur keberhasilan unit kerja	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja akan ditindak lanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, dan mengukur keberhasilan unit kerja di tahun selanjutnya

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyerapan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2025 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang diimplementasikan melalui realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025. Rincian realisasi anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung dapat dilihat pada table berikut ini :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025															Ket
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.972.699.482	530.659.900					4.503.359.382	3.327.383.196	513.791.835					3.822.600.096	84,88%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.873.500					29.873.500		29.757.500					29.757.500	99,61%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16.750.000					16.750.000		16.728.000					16.728.000	99,87	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.462.500					3.462.500		3.445.000					3.445.000	99,49	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.299.000					3.299.000		3.273.500					3.273.500	99,23	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3.213.000					3.213.000		3.187.000					3.187.000	99,19	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.149.000					3.149.000		3.124.000					3.124.000	99,21%	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.972.699.482	14.530.000					3.987.229.482	3.327.383.196	14.519.500					3.341.902.696	83,82%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.972.699.482						3.972.699.482	3.327.383.196						3.327.383.196	83,76%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025															Ket
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12.000.000					12.000.000		11.995.000					11.995.000	99,96	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.530.000					2.530.000		2.524.500					2.524.500	99,78	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.000.000					6.000.000		3.480.000					3.480.000	58,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		6.000.000					6.000.000		3.480.000					3.480.000	58,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		136.884.200					136.884.200		132.288.085					132.288.085	96,64	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.000.000					1.000.000		991.785					991.785	99,18	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.231.200					1.231.200		1.223.300					1.223.300	99,36	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.327.000					1.327.000		1.327.000					1.327.000	100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.200.000					1.200.000		1.100.000					1.100.000	91,67	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		132.126.000					132.126.000		127.646.000					127.646.000	96,61	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025															Ket	
		Jumlah Pagu							Realisasi									Capaian (%)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90.086.000					90.086.000		86.130.000					86.130.000	95,61		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan-Lainnya		90.086.000					90.086.000		86.130.000					86.130.000	95,61		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		172.404.000					172.404.000		154.686.100					154.686.100	89,72		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		15.000.000					15.000.000		14.969.900					14.969.900	99,80		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		700.000					700.000		325.000					325.000	46,43		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.562.800					2.562.800		2.500.000					2.500.000	97,55		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		154.141.200					154.141.200		136.891.200					136.891.200	88,81		
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		76.882.200					76.882.200		70.403.515					70.403.515	91,57		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		40.000.000					40.000.000		38.820.000					38.820.000	97,05		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025														Ket	
		Jumlah Pagu							Realisasi								Capaian (%)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		15.000.000					15.000.000		9.715.515					9.715.515	64.77	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		21.882.200					21.882.200		21.868.000					21.868.000	99.94	
7	Penataan Organisasi		4.000.000					4.000.000		3.952.200					3.952.200	98.81	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2.000.000					2.000.000		1.992.500					1.992.500	99.63	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2.000.000					2.000.000		1.959.700					1.959.700	97.99	
B	Program Pengembangan Perumahan		43.860.000					382.330.000		62.193.115					382.193.115	99,96	
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		29.240.000					29.240.000		29.191.515					29.191.515	99,83	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		14.190.000					14.190.000		14.189.007					14.189.007	99,99	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		6.060.000					6.060.000		6.058.500					6.058.500	99,98	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		8.990.000					8.990.000		8.944.008					8.944.008	99,49	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025															Ket
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		22.230.000			329.860.000		352.090.000		32.001.600			320.000.000		352.001.600	99,97	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		14.610.000			268.500.000		283.110.000		23.065.800			260.000.000		283.065.800	99,98	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		7.620.000			61.360.000		68.980.000		8.935.800			60.000.000		68.935.800	99,94	
2	Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1.000.000					1.000.000		1.000.000					1.000.000	100	
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1.000.000					1.000.000		1.000.000					1.000.000	100	
C	Program Kawasan Permukiman		87.125.000			121.040.000	169.400.000	377.565.000		88.010.526			120.000.000	169.289.000	377.299.526	99,93	
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		6.950.000					6.950.000		6.944.000					6.944.000	99,91	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		6.950.000					6.950.000		6.944.000					6.944.000	99,91	
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		80.175.000			121.040.000	169.400.000	370.615.000		81.066.526			120.000.000	169.289.000	370.355.526	99,93	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		5.750.000			121.040.000		126.790.000		6.787.000			120.000.000		126.787.000	100	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025														Ket	
		Jumlah Pagu							Realisasi								Capaian (%)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		74.425.000					74.425.000		74.279.526					74.279.526	99,80	
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						169.400.000	169.400.000						169.289.000	169.289.000	99,93	
D	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		18.090.000			125.940.000		144.030.000		24.019.500			120.000.000		144.019.500	99,93	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		18.090.000			125.940.000		144.030.000		24.019.500			120.000.000		144.019.500	99,99	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		18.090.000			125.940.000		144.030.000		24.019.500			120.000.000		144.019.500	99,99	
D	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		3.282.782.252				2.804.558.098	6.087.340.350		3.238.703.572				2.768.452.500	6.007.156.072	98,68%	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		3.282.782.252				2.804.558.098	6.087.340.350		3.238.703.572				2.768.452.500	6.007.156.072	98,68%	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		3.282.782.252				2.804.558.098	6.087.340.350		3.238.703.572				2.768.452.500	6.007.156.072	98,68%	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025															Ket	
		Jumlah Pagu							Realisasi									Capaian (%)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		3.282.782.252				2.804.558.098	6.087.340.000		3.238.703.572				2.768.452.500	6.007.156.072	98,68%		

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pencapaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat kedalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang kelautan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawain dan perencanaan.
2. Capaian kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah

Rasio Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo terhadap sasaran strategis perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025		PROGRAM / KEGIATAN/SUB.KEGIATAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PAGU	ANGGARAN TAHUN 2025	
			PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(8)	
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.503.359.382	3.822.600.096			
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.873.500	29.757.500			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.750.000	16.728.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.462.500	3.445.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.299.000	3.273.500			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.213.000	3.187.000			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.149.000	3.124.000			
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.987.229.482	3.341.902.696
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.972.699.482	3.327.383.196

Tabel 3.10.
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025		PROGRAM / KEGIATAN/SUB.KEGIATAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PAGU	ANGGARAN TAHUN 2025	
			PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(8)	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.000.000	11.995.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.530.000	2.524.500			
3					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	3.480.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	3.480.000
4					Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.884.200	132.288.085
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	991.785
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.231.200	1.223.300
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.327.000	1.327.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.00010	1.100.00010

Tabel 3.10.
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025		PROGRAM / KEGIATAN/SUB.KEGIATAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PAGU	ANGGARAN TAHUN 2025	
			PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(4)	(8)
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.126.000	127.646.000
4					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.086.000	86.130.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.086.000	86.130.000
5					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.404.000	154.969.900
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	14.969.900
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000	325.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.562.800	2.500.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.141.200	136.891.200
6					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.882.200	70.403.515

Tabel 3.10.
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025		PROGRAM / KEGIATAN/SUB.KEGIATAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PAGU	ANGGARAN TAHUN 2025	
			PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(8)	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	38.820.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ata Lapangan	15.000.000	9.715.515
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.882.200	21.868.000
7		Penataan Organisasi	4.000.000	3.952.200			
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.000.000	1.992.500			
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.000.000	1.959.700			
II.		Program Pengembangan Perumahan	382.330.000	382.193.115			

Tabel 3.10.
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025		PROGRAM / KEGIATAN/SUB.KEGIATAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PAGU	ANGGARAN TAHUN 2025	
			PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(4)	(8)
1	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	29.240.000	29.191.515			
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	14.190.000	14.189.007			
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.060.000	6.058.500			
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.990.000	8.944.008			
2		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	352.090.000	352.001.600			
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	283.110.000	283.065.800			
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	68.980.000	68.935.800			
3		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.000.000	1.000.000			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.000.000	1.000.000				

Tabel 3.10.
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025		PROGRAM / KEGIATAN/SUB.KEGIATAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PAGU	ANGGARAN TAHUN 2025	
			PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(4)	(8)
		Program Kawasan Permukiman	377.565.000	377.299.526			
III.		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	6.950.000	6.944.000			
		Survei dan Penetapan lokasi Permukiman Kumuh	6.950.000	6.944.000			
2	Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	370.615.000	370.355.526	370.615.000	370.615.000	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	126.790.000	126.787.000	126.790.000	126.790.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	74.425.000	74.279.526	74.425.000	74.425.000	
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	169.400.000	169.289.000	169.400.000	169.400.000	
IV.		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	144.030.000	144.019.500	144.030.000	144.030.000	

Tabel 3.10.
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025		PROGRAM / KEGIATAN/SUB.KEGIATAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PAGU	ANGGARAN TAHUN 2025	
			PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(4)	(8)
1		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	144.030.000	144.019.500	144.030.000	144.030.000	
		Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	144.030.000	144.019.500	144.030.000	144.030.000	
V.		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6.087.340.350	6.007.156.072	6.087.340.350	6.087.340.350	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.087.340.350	6.007.156.072	6.087.340.350 98,68%	6.087.340.350	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.087.340.350	6.007.156.072	6.087.340.350	6.087.340.350	

Berdasarkan tabel di atas, rasio belanja yang terkait dengan sasaran strategis perangkat daerah sebesar 80% dan rasio belanja yang tidak terkait dengan sasaran strategis perangkat daerah sebesar 20%, dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Wajo, rasio belanja yang terkait dengan sasaran perangkat daerah lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja yang tidak terkait dengan sasaran perangkat daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

3. Rasio Belanja Terhadap Sasaran RPJMD

Tabel 3.11.
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026

NO	SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEGIATAN YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TAHUN 2025		PROGRAM / KEGIATAN/SUB.KEGIATAN YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PAGU	ANGGARAN TAHUN 2025	
			PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(8)	
A.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.503.359.382	3.822.600.096			
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.873.500	29.757.500			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.750.000	16.728.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.462.500	3.445.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.299.000	3.273.500			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.213.000	3.187.000			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.149.000	3.124.000			
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.987.229.482	3.341.902.696
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.972.699.482	3.327.383.196

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.000.000	11.995.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.530.000	2.524.500			
3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.000.000	3.480.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000	3.480.000
4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.884.200	132.288.085
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	991.785
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.231.200	1.223.300
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.327.000	1.327.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.00010	1.100.00010
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.126.000	127.646.000
4				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.086.000	86.130.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.086.000	86.130.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172.404.000	154.969.900
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	14.969.900
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000	325.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.562.800	2.500.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.141.200	136.891.200
6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.882.200	70.403.515
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	38.820.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	9.715.515
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.882.200	21.868.000
7	Penataan Organisasi	4.000.000	3.952.200			
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2.000.000	1.992.500			
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.000.000	1.959.700			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

II.	Meningkatnya Pemenuhan SPM Bidang Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	382.330.000	382.193.115			
1		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	29.240.000	29.191.515			
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	14.190.000	14.189.007			
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.060.000	6.058.500			
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	8.990.000	8.944.008			
2		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	352.090.000	352.001.600			
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	283.110.000	283.065.800			
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	68.980.000	68.935.800			
3		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.000.000	1.000.000			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.000.000	1.000.000			
III.		Meningkatnya Luasan Permukiman yang Tertata	Program Kawasan Permukiman	377.565.000	377.299.526		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		6.950.000	6.944.000			
	Survei dan Penetapan lokasi Permukiman Kumuh		6.950.000	6.944.000			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

2	Peningkatan kualitas Kawasan Per- mukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	370.615.000	370.355.526	370.615.000	370.615.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	126.790.000	126.787.000	126.790.000	126.790.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengdali- an Penyelenggaraan Pemugar- an/Peremajaan Permukiman Kumuh	74.425.000	74.279.526	74.425.000	74.425.000	
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	169.400.000	169.289.000	169.400.000	169.400.000	
IV.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	144.030.000	144.019.500	144.030.000	144.030.000	
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	144.030.000	144.019.500	144.030.000	144.030.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	144.030.000	144.019.500	144.030.000	144.030.000	
V.	Program Peningkatan Prasarana, Sara- na dan Utilitas Umum (PSU)	6.087.340.350	6.007.156.072	6.087.340.350	6.087.340.350	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Pe- rumahan	6.087.340.350	6.007.156.072	6.087.340.350 98,68%	6.087.340.350	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.087.340.350	6.007.156.072	6.087.340.350	6.087.340.350	

Berdasarkan tabel di atas, rasio belanja yang terkait dengan sasaran strategis RPJMD sebesar 80% dan rasio belanja yang tidak terkait dengan sasaran strategis RPJMD sebesar 20%

C. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah 2024

Tabel 3.11 tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi inspektorat daerah

No	Rekomendasi Inspektorat Daerah	Tindak Lanjut yang telah dilakukan	Keterangan
1	2	3	4
1	Membuat SK pedoman perencana kinerja yang lengkap dan terintegrasi dengan kinerja individu PK, Renaksi, SKP	Telah menyusun perencanaan kinerja yang terintegrasi dengan IKI, PK dan SKP untuk pencapaian kinerja Organisasi dengan perpedoman pada Hasil pertemuan dan koordinasi dengan Bappelitbangda	
2	Menyusun dokumen rencana aksi seluruh pegawai sampai tingkat pelaksana	Rencana Aksi telah disusun melalui Aplikasi Ekinerja BKN dan menjadi dasar pembayaran TPP atas realisasi Renaksi tersebut	
3	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja yang dapat diakses	untuk mengefektifkan hal ini akan dibuat website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempublikasikan dokumen dokumen yang urgen bagi publik	
4	Melakukan reuiu terhadap indikator dengan target kinerja sub kegiatan, kegiatan dalam rangka perbaikan cascading kinerja	telah dilakukan reuiu baik internal maupun reuiu oleh Bappelitbangda Kabupaten Wajo	
5	Menyusun identifikasi dan pemetaan atas potensi terjadinya croscutting antar perangkat daerah dan pihak-pihak terkait dalam mencapai kinerja organisasi	Sementara dalam proses penyusunan dan menunggu Format Buku dari Bappelitbangda	
6	Menjabarkan Perjanjian Kinerja di setiap level jabatan	Telah dibuatkan PK untuk semua level jabatan untuk pencapaian tujuan organisasi	
7	Melampirkan bukti keterlibatan setiap pegawai dalam pengukuran kinerja seperti bukti dialog kinerja atau rapat monev	Telah dilaksanakan rapat secara rutin untuk membahas pengelolaan kinerja	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2025

8	Menyusun SOP atau kebijakan internal maupun kebijakan level kabupaten terkait pengumpulan data kinerja	Menunggu kebijakan level Kabupaten	
9	Membuat aplikasi pengumpulan data kinerja, baik data kinerja individu, data kinerja IKU, IKK dan SPM	Aplikasi penilaian kinerja, IKU dan IKK dibuat oleh OPD terkait (BKPSDM, Bapperida, Bagian Ortala), OPD hanya melaporkan data hasil kinerja	
10	"Membuat analisis efisiensi yang membedakan efisiensi sumber daya keuangan, pegawai dan peralatan - Efisiensi yang dimaksud adalah efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya, bukan karena adanya faktor eksternal atau teknis yang menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana atau anggaran tidak terserap - Terdapat narasi upaya efisiensi apa saja yang dilakukan"	Telah dijabarkan dalam berbagai laporan terkait efisiensi yang telah dilakukan	
11	Mempublikasikan Laporan Kinerja yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat	untuk mengefektifkan hal ini akan dibuat website Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempublikasikan dokumen dokumen yang urgen bagi publik	
12	Membuat rekomendasi/Saran perbaikan yang belum menyentuh masalah riil pada ranah teknis dan kebijakan	Telah dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja, LKPJ dan LPPD	
13	Membuat analisis teknis pada setiap tabel BAB III, yang tidak hanya menjelaskan isi tabel saja	Telah ditindaklanjuti dalam penyusunan LKJIP Tahun 2025	
14	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya	Telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya	

Berdasarkan table diatas , dapat disimpulkan bahwa hasil implementasi system akuntabilitas kinerja untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hasil akhir kategori baik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bukan saja sekedar laporan pertanggungjawaban tetapi juga merupakan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung tujuan organisasi serta memberikan masukan dan perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan dimasa mendatang. Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo bahwa program yang telah ditetapkan dalam RKA dan DPA Tahun 2025 dapat dicapai dengan baik..

Adapun kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi keuangandari 4 program yang mencakup 12kegiatan serta3 0sub kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar 87,61 % tergolong dalam kriteria tinggi. Capaian diatas menunjukkan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo turut berkontribusi dalam melaksanakan pengawasan yang akuntabel dan transparan sesuai Misi RPJMD 2019-2025 yang berkaitan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo.Capaian rata-rata pelaksanaan fisk program, kegiatan dan sub kegiatan adalah 100% kecuali Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) tidakdapat dilaksanakan karena keterbatasan APBD II menyiapkan dana sharing sebesar 60% untuk anggaran fisik pembangunan rumah sehingga realisasi fisik sebesar 33,33% dan realisasi keuangans ebesar 7,69% yang mempengaruhi icapaian realisasi keuangn Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo.
2. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan berdasar pada skala prioritas yang selaras dengan RPJMD dan Renstra agar anggaran yang terserap dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sehingga pencapaian sasaran dapat optimal .

Akhirnya pimpinan beserta segenap pegawai Dinas Perumahan dan KawasanPermukimanKabupatenWajoberharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025dapat digunakan sebagai bahaninformasi dan masukandalam pengambilan keputusan serta dapat mendukung optimalisasi

pencapaian kinerja sasaran menuju kemakmuran masyarakat Kabupaten Wajo di masa mendatang.

B. Saran

Saran atau langkah yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Wajo adalah :

1. Menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan Rencana Aksi yang jelas untuk meningkatkan efektifitas kinerja pegawai karena dapat dijadikan acuan dan pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan, apa saja yang harus dicapai, dan ketentuan *timeline* kerja.
2. Fokus pada tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta target yang telah ditetapkan, sehingga tujuan, sasaran serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat diwujudkan.
3. Memberikan apresiasi/*reward* kepada pegawai yang telah memberikan kinerja yang baik atau telah memenuhi target sehingga dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya, serta *punishment* kepada pegawai yang tidak menunjukkan kinerja yang baik.
4. Selalu melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja organisasi dan pegawai.

LAMPIRAN